

Analisis Keberhasilan Implementasi Program Pertanian Perkotaan di Kelurahan Lakarsantri Kota Surabaya

Ardyan Rakhmad Pradana, Wahyu Nurharjadmo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
email: Danang.ardyan04@gmail.com

Abstrak

Kota Surabaya terdapat masalah yang kompleks yaitu tingginya angka kemiskinan dan semakin sempitnya lahan produktif, maka untuk penanganannya Kota Surabaya mengimplementasikan program kebijakan *Urban Farming*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor keberhasilan implementasi program *urban farming* di Kelurahan Lakarsantri dengan menggunakan teori dari George C. Edward III. Beberapa faktor yang diteliti adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Proses analisis data menggunakan analisis intraktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program *urban farming* di Lakarsantri disebabkan karena faktor komunikasi yang berjalan dengan baik, jelas, dan konsisten; sumber daya yang mumpuni seperti kelompok tani, pengadaan lahan, bibit, anggaran pelatihan, serta alat pertanian; disposisi pelaksana yang terbuka dan berhasil membangun kepercayaan antar semua pihak; serta struktur birokrasi yang terarah. Secara umum program *urban farming* selain memperluas lahan produktif di wilayah Surabaya, juga membantu perekonomian sebagian masyarakat serta menambah kegiatan produktif yang bermanfaat baik bagi masyarakat, pemerintahan, dan juga lingkungan. Kondisi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai contoh bagi wilayah lain yang memiliki kendala yang serupa dalam menjalankan sektor pertanian di daerah perkotaan.

Kata Kunci: Evaluasi, Pertanian, Urban farming, Kemiskinan

Abstract

The city of Surabaya has a complex problem, namely the poverty rate and the narrowing of productive land, so to deal with it, the City of Surabaya implements an Urban Farming policy program. This research aims to analyze the factors that influence the successful implementation of the urban farming program in Lakarsantri Village by using theory from George C. Edward III. Some of the factors examined were factors of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study used a descriptive qualitative research method. Data collection was carried out by interviewing, documenting, and observing. The data analysis process used interactive analysis, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the success of the urban farming program in Lakarsantri was due to communication factors that went well, clearly, and consistently; qualified resources such as farmer groups, land procurement, seedlings, training budgets and agricultural equipment, open disposition of executor and successful build trust among all parties, as well as directed bureaucratic structures. In general, urban farming programs apart from expanding productive land in the Surabaya area also help the economy of some communities and increase beneficial productive activities. good for the community, government, and also the environment. This condition is expected to serve as an example for other areas that have similar obstacles in running an agricultural sector in urban areas.

Keywords: Evaluation, Agriculture Urban Farming, Poverty.

Pendahuluan

Negara agraris adalah sebutan yang cocok bagi negara Indonesia, dengan penduduk yang tersebar di beberapa pulau, kemudian ditunjang dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah sektor pertanian yang dapat diandalkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Maka atas pandangan langsung dan tidak langsung, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam hal pangan bisa berdampak pada kehidupan warga di suatu negara dalam sektor sosial-politik, sektor ekonomi-bisnis, hingga sektor budaya dan keamanan negara. Ketahanan pangan nasional menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah dan warga negara karena kedaulatan dan kebesaran nama bangsa bisa dilihat bagaimana negara tersebut mengatasi permasalahan di bidang ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, di mana dijelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah dan masyarakat.

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan suatu negara (Simatupang, 2007). Perwujudan ketahanan dapat dilakukan melalui sektor pertanian. Dari data indeks ketahanan pangan, Indonesia masih berada pada kondisi yang jauh dibandingkan negara-negara lain, khususnya negara Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami masalah dalam sektor pertanian yang menjadi sumber ketahanan pangan nasional.

Salah satu permasalahan yang menghambat sektor pertanian ialah fenomena industrialisasi. Dalam hal tersebut, terdapat aktivitas yang mengganggu, misalnya pergantian fungsi lahan produktif pertanian menjadi lahan untuk industri dan juga pembangunan infrastruktur penunjang kepentingan publik seperti jalan raya, pusat perbelanjaan dan perumahan bagi warga yang akan membuat lahan produktif pertanian semakin minim. Seiring industrialisasi yang semakin meluas di Indonesia, sebagian masyarakat mulai meninggalkan pertanian dan memilih pekerjaan baru di sektor industri. Jika terus terjadi, maka bisa diprediksi ketahanan pangan negara akan semakin menurun. Salah satu ancaman berbahaya bagi ketahanan pangan di Indonesia adalah konversi lahan karena akibat yang ditimbulkan kemungkinan besar akan permanen. Lahan produktif yang sudah dikonversi menjadi bangunan hanya memiliki peluang kecil untuk menjadi lahan produktif lagi.

Kota Surabaya merupakan pusat kota perdagangan, jasa dan tentunya pusat pemerintahan pada provinsi. Sebagai kota besar tidak terlepas dari persoalan pada bidang kemiskinan dan bidang pertanian. Kota Surabaya dijadikan banyak warga sekitar kota untuk mengadu nasib di tengah bayang-bayang masalah urban dan kemiskinan. Muncul masalah baru di kota besar ini diakibatkan adanya perkembangan penduduk yang disebabkan oleh gelombang urbanisasi yang tinggi dan visi dalam perkembangan kota hanya terfokus dengan laju ekonomi daerah. Tingkat Urbanisasi yang terus bertambah akan menimbulkan banyak masalah, salah satunya tingkat kepadatan penduduk. Menurut

data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahun.

Data yang dihimpun tersebut dapat disimpulkan bahwa kota Surabaya masih menjadi kota tujuan para pendatang dan jumlah pendatang masih cukup banyak sehingga memunculkan masalah seperti meningkatnya jumlah pengangguran, kriminalitas, bangunan liar, kurangnya lapangan pekerjaan dan yang paling utama masalah pada aspek ekonomi yakni kemiskinan. Golongan/kelompok yang memiliki standar tingkat hidup yang kekurangan materi dibandingkan dengan standar hidup umum yang berlaku dalam masyarakat merupakan definisi kemiskinan menurut Parsudi Suparlan (dalam Shobry 2016). Hingga saat ini kemiskinan juga meningkat di wilayah perkotaan.

Munculnya permasalahan ketahanan pangan bagi masyarakat perkotaan diakibatkan dari semakin sempitnya lahan produktif pertanian, pendapatan masyarakat yang tidak merata dan stigma masyarakat bahwa pertanian hanya dapat dilaksanakan di desa saja. Pusat pergerakan ekonomi pantas disematkan kepada Kota Surabaya, hal ini berdasarkan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi berasal dari sektor perdagangan dan sektor jasa. Dalam peranan ekonomi sektoral PDRB Kota Surabaya, sektor pertanian memiliki tingkat peranan ekonomi yang rendah. Angka presentase yang cenderung menurun dari tahun 2015-2019 dan akan berdampak terhadap ketersediaan bahan pangan yang ikut menurun. Dalam pemenuhan kehidupannya, masyarakat dengan penghasilan tidak tetap akan cenderung kesulitan yang menyebabkan kekurangan dalam ketersediaan bahan makanan mereka. Hal ini juga dirasakan oleh penduduk pendatang yang masih mencoba mencari pekerjaan di Kota Surabaya, sehingga kedatangan mereka untuk mencari pekerjaan justru menambah angka kemiskinan di Surabaya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 130,55 ribu orang atau sekitar 4,51% penduduk Surabaya mengalami kemiskinan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 161,01 ribu warga atau sekitar 5,63%, kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan jumlah. Penurunan presentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya semakin membaik namun masih tergolong dalam tingkat kemiskinan yang tinggi di kota metropolitan.

Penanganan masalah di bidang ketahanan pangan dan kemiskinan serta pemanfaatan lahan merupakan salah satu aspek kewenangan daerah yang tercantum pada Perda No 11 tahun 2008 Kota Surabaya. Dalam butir tersebut, disebutkan setidaknya tujuh kewenangan yang dapat memacu ketahanan pangan, pemberantasan kemiskinan, dan pemanfaatan lahan di antaranya Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Industri, dan Perdagangan. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada aspek pertanian yang dilakukan di wilayah perkotaan Surabaya yang disebut sebagai *urban farming*/aktivitas pertanian tingkat perkotaan.

Aktivitas pertanian baik yang berada di dalam atau pinggiran kota bisa menghasilkan, mengerjakan dan menyalurkan berbagai produk pangan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar merupakan definisi *urban farming* (Jac Smith 2001). Dengan kata lain *urban farming* adalah pemanfaatan lahan produktif yang kosong melalui aktivitas pertanian di wilayah kota dengan melibatkan pengalaman, kompeten, terampil dan berpikir berkelanjutan dalam peningkatan pengelolaan bahan pangan bagi warga miskin yang berguna dalam peningkatan kualitas gizi, menguatkan pendapatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang kemudian muncul motivasi supaya bisa hidup layak dan mandiri dalam hal ekonomi.

Berdasarkan hasil Musrembang Kota Surabaya, program *urban farming* di Kota Surabaya telah berjalan sejak tahun 2009 dan berjalan baik serta berhasil untuk mencetak beberapa komoditas pertanian, di mana hal ini disebabkan banyaknya kegiatan dari masyarakat yang mampu dijalankan. Total 6000 Kepala Keluarga yang berasal dari keluarga miskin telah mengikuti kegiatan *urban farming* sejak tahun 2011 dan sampai sekarang masih terus bertambah dan berkembang. Dengan semakinnya minim lahan produktif pertanian di wilayah Kota Surabaya maka pemerintah khususnya di wilayah Kota Surabaya terus melaksanakan program *urban farming* untuk menciptakan ketahanan pangan dan kemandirian pangan di Kota Surabaya.

Keberhasilan kebijakan penanganan ketahanan pangan hingga pengentasan kemiskinan melalui *urban farming* pernah disampaikan oleh Wali Kota Surabaya. Dengan gencarnya konversi lahan produktif di wilayah perkotaan yang dikarenakan banyaknya proyek pembangunan yang dilakukan sehingga mengakibatkan persaingan untuk pemerolehan lahan. Hal ini yang membuat semakin mengecilnya lahan produktif di Kota Surabaya.

Salah satu masyarakat kelompok tani yang masih aktif menerapkan program *urban farming* hingga saat ini adalah Kelompok Wanita Tani Lakarsantri Lestari kota Surabaya. Dalam wilayah Kecamatan Lakarsantri terdapat delapan kelompok tani dengan anggota sekitar 622 orang. Dari hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program *urban farming* di Kota Surabaya, khususnya di Kelurahan Lakarsantri. Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan program *urban farming* di Kelurahan Lakarsantri Kota Surabaya bisa berhasil?

Terdapat beberapa model implementasi yang digunakan dalam menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung secara efektif. Dalam penelitian ini model implementasi yang digunakan adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III keempat faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Komunikasi yang berhasil antara implementor dan kelompok sasaran akan menyebabkan terlaksananya kebijakan dengan baik. Untuk mencegah adanya penyimpangan dalam kebijakan maka dibuatlah sosialisasi yang efektif untuk

memberi informasi terhadap kelompok sasaran terkait tujuan dan sasaran dari dibuatnya kebijakan tersebut.

2. Sumber daya merupakan faktor vital dalam implementasi sebuah kebijakan. Sumber daya dapat dibagi ke dalam beberapa hal, di antaranya sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya peralatan. Sumber daya manusia merupakan kelengkapan dari segi kualitas dan kuantitas implementor yang dapat mencakup semua kelompok sasaran. Sumber daya finansial merupakan kelengkapan dari segi persediaan dana bagi sebuah kebijakan. Sumber daya peralatan merupakan kelengkapan dari segi persediaan alat dan segala hal mengenai kebijakan
3. Karakter pada implementor yang harus dipunyai antara lain komitmen, kejujuran dan sikap demokratis, karena disposisi ditentukan kepada karakter yang dipunyai oleh implementor kebijakan. Dalam membangkitkan gairah dalam mencapai pelaksanaan tahapan kebijakan secara konsisten maka diperlukan komitmen dari implementor tersebut supaya tetap di alur kebijakan yang sesuai.
4. Struktur birokrasi menjadi aspek yang penting. Terdapat dua hal penting meliputi mekanisme implementasi dan struktur organisasi. Dalam mekanisme implementasi kebijakan telah menetapkan standar operating procedur (SOP) yang terdapat pada pedoman kebijakan tersebut. Sebagai rujukan dalam kerja implementor, SOP harus berisi kerangka kerja yang jelas, sistem yang tersusun baik sehingga mudah dimengerti oleh siapapun yang membaca.

Model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III termasuk dalam studi implementasi kebijakan pada generasi kedua yang berfokus dalam determinan keberhasilan implementasi kebijakan dianggap penulis sebagai model yang relevan dalam menganalisis kebijakan *top down* karena model tersebut merupakan penyederhanaan dari model implementasi kebijakan yang lain dan dirasa sangat selaras dengan jenis kebijakan publik yang dikaji, yaitu *urban farming*.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian di mana data yang dikumpulkan akan berupa kata-kata, gambar dan bukan mengenai angka-angka (Moleong, 2000:6). Dengan demikian data penelitian berisi kumpulan kutipan yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, memo dan dokumen lain yang berkaitan.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Surabaya, lebih tepatnya pada Kelompok Wanita Tani Lestari di wilayah Kelurahan Lakarsantri Kota Surabaya dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya yang merupakan implementor dan koordinator program *urban farming* di Kota Surabaya. Penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Surabaya karena Keberhasilan kebijakan ketahanan pangan hingga

pengentasan kemiskinan melalui *urban farming* disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam forum gubernur dan walikota. Pemilihan lokasi penelitian di kelompok wanita tani lestari di wilayah Kelurahan Lakarsantri Surabaya dikarenakan seluruh kegiatan kelompok yang ada di wilayah Kelurahan Lakarsantri merupakan binaan penuh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan lahan yang mereka kerjakan merupakan lahan terluas dari beberapa kelompok wanita tani lainnya.

Teknik penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling*. Purposive sampling adalah kegiatan memilih informan secara sengaja dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:126). Pertimbangan tersebut didasarkan atas anggapan bahwa informan tersebut mengetahui segala informasi terkait data penelitian. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* karena peneliti memilih informan yang memiliki informasi tentang objek penelitian serta mengetahui pihak-pihak mana saja yang dinilai memiliki informasi tentang objek penelitian ini, sehingga bisa digali informasi melalui observasi atau wawancara secara mendalam sesuai dengan data yang dibutuhkan. Data penelitian terbagi ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada pihak yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti. Informan yang akan diwawancarai antara lain Kepala Seksi Pengembangan Pertanian Perkotaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Lakarsantri, dan Perwakilan Kelompok Wanita Tani Lestari Kelurahan Lakarsantri. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kegiatan observasi terhadap lokasi penelitian dan dokumentasi beberapa pendukung seperti data yang berasal dari buku referensi, arsip, dokumen serta literatur dari media massa dan jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan program *urban farming* di Kota Surabaya.

Pengumpulan data penelitian terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik wawancara merupakan upaya dalam mengumpulkan data primer penelitian dari keempat subjek yang telah ditentukan. Teknik dokumentasi dilakukan terhadap beberapa file dokumen yang dimiliki oleh informan yang diwawancarai serta artikel/berita yang membahas tentang program *urban farming* di Surabaya, khususnya Kelurahan Lakarsantri. Dengan kata lain, data yang diperoleh dari teknik dokumentasi merupakan pendukung/bukti data hasil wawancara. Sedangkan pada teknik observasi peneliti akan terjun secara langsung dalam lokasi penelitian, yaitu wilayah Kelurahan Lakarsantri, dengan mengamati kondisi lahan. Sama seperti data yang diperoleh dari dokumentasi, data observasi bertujuan untuk membuktikan, mendukung, serta melengkapi data hasil wawancara.

Analisis data merupakan kegiatan mengolah, menafsirkan, dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru atas data penelitian yang telah dikumpulkan. (Raco, 2010). Seperti yang dikemukakan sebelumnya, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Karenanya, jenis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan model interaktif menurut

Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga komponen penting yaitu Reduksi Data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan (dalam Sugiyono, 2013:249). Dalam penelitian ini untuk menguji validitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu (Moleong, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Program *urban farming* di kota Surabaya telah dilaksanakan dari tahun 2009. Pemberlakuan kebijakan *urban farming* ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kemiskinan dan konversi lahan di Kota Surabaya. Maksud dan tujuan dari diadakannya program *urban farming* adalah untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah perkotaan dalam memanfaatkan lahan pertanian yang semakin sempit atau cenderung berkurang, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, nilai ekonomis, kenyamanan lingkungan sekitar, kualitas lingkungan kota, serta dapat meningkatkan estetika wilayah perkotaan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya di seluruh kecamatan yang ada di Kota Surabaya yang memiliki kepadatan penduduk yang beragam. Dalam pelaksanaannya, program *urban farming* ini meliputi bagaimana bentuk usaha dalam administrasi atau menimbulkan dampak yang nyata bagi kelompok sasaran. Sedangkan proses yang dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) telah dimulai sejak program ini dirumuskan. Mulai dari tahapan persiapan pelaksanaan program *urban farming*, sosialisasi kepada kelompok sasaran, pelaksanaan program *urban farming* dan mengevaluasi kebijakan *urban farming* itu sendiri.

Tahapan dalam implementasi kebijakan *urban farming* di Kota Surabaya dilakukan dengan beberapa tahap, di antaranya persiapan database pada Gakin Surabaya, melakukan identifikasi lokasi dan inventarisasi penerima bantuan, melakukan validasi dan verifikasi, pengadaan rekrutmen tenaga pendamping, persiapan pengadaan barang, mengadakan kegiatan sosialisasi, menyalurkan paket bantuan, pemanfaatan, pendampingan, melakukan *monitoring* dan evaluasi, dan diakhiri dengan tahap pelaporan.

Wilayah Kecamatan Lakarsantri memiliki delapan kelompok tani dengan anggota sekitar 622 orang. Salah satu yang termasuk dalam kelompok tersebut yaitu Kelompok Wanita Tani Lakarsantri Lestari. Kelompok Wanita Tani Lakarsantri Lestari memiliki anggota berjumlah 35 orang yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga dan mengerjakan lahan pertanian dengan luas total 2.000 m². Kelompok Wanita Tani Lakarsantri Lestari dibentuk dalam rangka memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan yang merupakan salah satu tujuan dari program *urban farming*. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur, atau lahan kosong yang tidak produktif.

Selain itu kegiatan ini juga berorientasi terhadap pasar yaitu berperan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Sejatinya, program *urban farming* yang dilaksanakan terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pertumbuhan, pembinaan, dan pengembangan. Untuk Kelompok Wanita Tani Lakarsantri Lestari sendiri memasuki tahap pertumbuhan. Skema tahap pertumbuhan *urban farming* dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.1

Skema Tahap Pertumbuhan *Urban Farming*



Sumber: Data Penelitian

Dari gambar di atas, diperoleh bahwa dalam tahap pertumbuhan, penerima manfaat program kebijakan adalah masyarakat yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna, KWT, atau lembaga lainnya. Terdapat empat kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap penumbuhan, yaitu kebun bibit, demplot, pertanaman, serta pasca panen dan pemasaran. Kegiatan tahap pertumbuhan di Kelompok Wanita Tani Lakarsantri Lestari sudah sesuai dengan target yang dirumuskan, di mana meliputi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kegiatan Kebun Bibit

Lokasi kegiatan optimalisasi pekarangan diterapkan pada pekarangan rumah warga, khususnya rumah anggota Kelompok Wanita Tani Lakarsantri Lestari yang tersebar di Kecamatan Lakarsantri. Sedangkan lokasi demplot dan rumah pembibitan ditempatkan di lahan fasum sebelah kiri kantor kecamatan atau terletak di belakang SDN Lakarsantri II. Semua bibit sayuran berasal dari *green house* yang pembibitannya dilakukan pada bulan Juli yang lalu dapat dirinci sebagai berikut. Total jumlah hasil pembibitan hingga sekarang mencapai 10.182 bibit, Jumlah bibit yang ditanam di Dempot hingga sekarang 7.221 bibit.

2. Kegiatan Demplot

Demplot milik anggota Kelompok Wanita Tani Lakarsantri Lestari telah dimanfaatkan dengan cara bibit yang telah jadi di kebun bibit dipindahkan pada demplot. Untuk tanaman kangkung telah dilakukan panen beberapa kali untuk konsumsi anggota kelompok. Selain itu juga ada tanaman lain yang ditanam seperti sayur kol dan tomat. Secara rinci, hasil panen di demplot yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Total jumlah hasil panen keseluruhan di demplot hingga sekarang mencapai 314,5 kg
- b. Jumlah hasil panen yang diberikan keanggota 80 kg
- c. Jumlah hasil panen yang dijual 234,5 kg

3. Kegiatan Pertanaman

Dalam pemanfaatan lahan pekarangan yang dilakukan oleh anggota Kelompok Wanita Tani Lakarsantri Lestari, anggota dapat memanen berbagai tanaman sayur dan buah yang dirawatnya. Hasil dari panen bisa menambah kebutuhan sayur dan buah dalam kondisi yang beragam yang dikonsumsi secara mandiri bersama dengan keluarga masing-masing. Secara keseluruhan, jumlah hasil panen dari pertanaman hingga sekarang mencapai 16 kg tanaman sayuran.

4. Kegiatan Pasca Panen dan Pemasaran

Kelompok Wanita Tani Lakarsantri Lestari telah melakukan beberapa kali kegiatan panen sayuran maupun buah-buahan. Hasil yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anggotanya. Selain itu, sebagian hasil panen tersebut juga dipasarkan kepada pedagang sayur di pasar. Hal ini dilakukan agar dapat menambah pemasukan kas yang berfungsi untuk membantu biaya perawatan kebun bibit maupun demplot milik Kelompok Wanita Tani Lakarsantri Lestari. Total Hasil penjualan panen sayuran oleh KWT Lakarsantri Lestari hingga penelitian ini dilakukan adalah sebesar Rp. 1.073,500,00 (dikutip dari Laporan Akhir Evaluasi Pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari, 2020).

Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program *urban farming* di kota Surabaya, Konsep faktor implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi George C. Edward. Faktor tersebut dijadikan sebagai indikator dalam mempengaruhi implementasi kebijakan *urban farming* di Kota Surabaya. Faktor-faktor tersebut diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi yang secara rinci dapat dibahas sebagai berikut:

a. Faktor Komunikasi

Joko Widodo (2008:97) mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan (*implementor*) yang terdiri atas beberapa dimensi, yaitu transformasi, kejelasan, dan konsistensi. Pada dimensi transformasi, kebijakan publik menghendaki agar informasi dapat tersampaikan kepada semua pihak, baik implementor maupun sasaran kebijakan. Berdasarkan data wawancara, pihak PPL menyatakan bahwa *Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian* merupakan implementor utama dalam kegiatan *urban farming*, kemudian Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) merupakan jabatan fungsional yang bertugas sebagai jembatan antara dinas dan target sasaran.

Pada dimensi kejelasan, dikehendaki agar kebijakan yang ditransformasikan kepada pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dapat diterima dengan jelas tanpa ada kesalahan sehingga dapat diketahui dan dipahami secara pasti apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta makna dari dilaksanakannya sebuah kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan pihak PPL dapat diketahui bahwa terjadi proses komunikasi secara mendalam pada pelaksanaan program *urban farming*. Dalam mengkaji taraf kejelasan informasi, peneliti akan melakukan perbandingan antara konsep kegiatan yang dirumuskan oleh pihak Dinas dengan bentuk kerja yang telah dilaksanakan oleh pihak Kelompok Wanita Tani Lestari.

Perbandingan tersebut terbagi ke dalam empat jenis kegiatan yaitu kebun bibit, demplot, pertanaman, dan pasca panen pemasaran yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Perbandingan Rencana dan Realisasi Kegiatan

Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Keterangan
KEBUN BIBIT		
Terletak di tanah bukan sewa (milik kelompok)	Terletak di tanah milik pemerintah/lahan tidur	Sesuai
Terletak pada lokasi yang mudah dijangkau	Terletak di belakang kantor kelurahan Lakarsantri	Sesuai
Mempunyai sumber air yang cukup	Kondisi tanah subur dengan dilengkapi pompa air	Sesuai
Terdapat rumah bibit dengan luas minimal 20 m ²	Terdapat <i>green house</i> dengan luas 25 m ²	Sesuai
Rangka terbuat dari baja ringan/kayu	Rangka terbuat dari baja ringan	Sesuai

Atap terbuat dari bahan tembus matahari	Atap terbuat dari plastik gelap tembus matahari	Sesuai
Sisi bangunan tertutup bahan yang melindungi dari hama/serangga	Sisi bangunan tertutup jaring pencegah hama	Sesuai
Terdapat rak dan sarana persemaian untuk produksi bibit	Terdapat rak dan peralatan semai	Sesuai
DEMPLOT		
Terletak di lokasi yang sama dengan rumah bibit	Terletak di depan dan samping <i>green house</i>	Sesuai
Ditanami dengan berbagai sayuran, buah, umbi (orientasi pasar)	Ditanami tomat, sayur kol, kangkung, jagung, cabai, singkong	Sesuai
PERTANAMAN		
Hasil digunakan untuk konsumsi anggota kelompok	Hasil dikonsumsi oleh keluarga anggota tani	Sesuai
PASCA PANEN DAN PEMASARAN		
Lebih produksi dapat dijual dan sebagai pendapatan rumah tangga	Menjual lebih hasil panen dengan harga murah (diperoleh uang sebesar (Rp 1.073.500,-))	Sesuai

Sumber: Data diolah

Dari data yang diolah, disebutkan bahwa secara keseluruhan antara rencana dan pelaksanaan di semua kegiatan tergolong sesuai. Tidak ada satupun kegiatan yang melenceng dari rencana awal. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diberikan, baik antara Dinas ke PPL, PPL ke Kelurahan, Kelurahan ke KWT, maupun alur lainnya tergolong sudah sangat jelas dan dimengerti oleh semua pihak.

Pada dimensi konsistensi, informasi dari kebijakan yang menyangkut arti, maksud, tujuan dan sasaran diharapkan dapat berjalan secara konsisten atau tidak mengalami perubahan. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa komunikasi dalam tahap evaluasi masih kurang berjalan baik. Hal itu dibuktikan oleh kelompok sasaran masih bingung terkait format/bentuk hasil laporan akhir yang diinginkan oleh Dinas. Hal ini mengakibatkan laporan evaluasi yang disusun sering direvisi dan dikembalikan untuk diperbaiki. Meski demikian, permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik meski dibutuhkan waktu yang tergolong lama.

b. Faktor Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang berperan penting dan tergolong vital dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Sumber daya dalam implementasi kebijakan *urban farming* dapat dirinci sebagai berikut.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan program *urban farming* di Kota Surabaya, sumberdaya manusia yang dibutuhkan terbagi ke dalam tiga jenis yang dapat dirinci sebagai berikut.

- 1) Ketua : Kepala Dinas yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota
- 2) Sekretaris : Kepala Bidang/ Sub Bidang yang bertanggungjawab menangani *urban farming*
- 3) Anggota : Petugas penyuluh yang ditunjuk langsung oleh dinas Dinas yang menangani ketahanan pangan Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya membentuk susunan pelaksana dalam tiga jenis di atas sebagai berikut.

- 1) Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (Yuniarto Herlambang, S.Si.)
- 2) Sekretaris : Seksi Pengembangan Pertanian Perkotaan (Antin Kusmira, Sp. M.Agr.)
- 3) Anggota : Petugas Penyuluh Lapangan Lakarsantri (Asjari Suryono, SP.)

Pelaksanaan pemilihan para Petugas Penyuluhan Lapangan sebagai pendamping kelompok sasaran yang dipilih dilakukan sesuai kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat ditunjukkan bahwa bahwa secara kualitas para PPL telah memahami secara mendalam segala hal terkait program *urban farming* serta mampu berkoordinasi secara vertikal dengan sasaran program dan horizontal dengan Dinas terkait, serta mampu menguasai teknik dalam pemberdayaan masyarakat. Penerima manfaat dalam tahap ini merupakan anggota masyarakat yang tergabung dalam organisasi tingkat kelurahan, salah satunya Kelompok Wanita Tani. Adapun daftar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *urban farming* tingkat Kelurahan Lakarsantri tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2

Sumber Daya Manusia tingkat Kelurahan

Jabatan	Nama	Alamat
Ketua LPMK	Zainal Arifin	RW 04
Wakil LPMK	M. Khoirul	RW 02
Ketua KWTL	Neneng Muafifah	RW 01
Wakil Ketua KWTL	Erwansah	RW 02
Sekretaris KWTL	Mukhoilah	RW 02
Bendahara KWTL	Poniarseh	RW 01
	Sri Wilujeng	RW 03
Anggota KWTL	Beberapa masyarakat daerah Lakarsantri	

Sumber : Data diolah

Secara keseluruhan, kebutuhan SDM yang dibutuhkan dalam implementasi program *urban farming* di Kelurahan Lakarsantri sudah terpenuhi di semua jabatan. Namun jika dilihat dari segi kecukupan sumber daya manusia, secara kuantitas masih kurang, khususnya pada posisi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

2. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran diperlukan sebagai biaya operasional dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya anggaran utama dari pelaksanaan urban farming berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya yang disusun setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait menunjukkan bahwa Lakarsantri termasuk ke dalam zona 1 melalui penyebutan anggaran sebesar 50 juta. Anggaran tersebut dikelola untuk keperluan beberapa hal. Pihak Dinas merumuskan beberapa kepentingan yang harus dipenuhi di antaranya sebagai berikut.

Tabel 1.3

Rincian Perencanaan Pengelolaan Anggaran

Tahapan	Bentuk Pembelanjaan
Kebun bibit	Pembangunan rumah bibit
	Pengadaan benih tanaman
	Pengadaan peralatan dan media tanam
Demplot	Pengadaan bibit tanaman

	Pengadaan peralatan dan media tanam
	Penyediaan sarana air sederhana
Pertanaman	Pengadaan peralatan dan media tanam
	Pengadaan pupuk
	Pengadaan peralatan lain yang dibutuhkan
Pasca Panen dan Pemasaran	Pengemasan
	Biaya transportasi

Sumber : Data diolah

Tabel di atas menunjukkan beberapa hal yang harus dilakukan terkait dengan pembelanjaan anggaran. Nominal 50 juta yang diberikan diwajibkan dibelanjakan sepenuhnya untuk kepentingan implementasi *urban farming* di Lakarsantri. Dalam realisasinya, pihak KWT Lakarsantri telah menghabiskan anggaran secara keseluruhan yang dirinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.4

Realisasi Pengelolaan Anggaran *Urban Farming* Lakarsantri

Tahapan	Bentuk Pembelanjaan	Nominal (Rp)	Waktu Pelaksanaan
Kebun bibit	Pembangunan rumah bibit	25.104.500	Juni-Oktober
	Pengadaan benih tanaman	807.000	
	Pengadaan peralatan dan media tanam	6.720.000	
Demplot	Pengadaan bibit tanaman	1.085.000	Juni-Oktober
	Pengadaan peralatan dan media tanam	1.070.000	
	Penyediaan sarana air sederhana	2.924.500	
	Kebutuhan Pupuk	855.000	
	Kebutuhan lain	3.039.000	
Pertanaman	Pengadaan peralatan dan media tanam	1.110.000	Juli- November
	Pengadaan Bibit	1.220.000	
	Pengadaan pupuk	1.755.000	

	Pengadaan peralatan lain yang dibutuhkan	2.580.000	
Pasca Panen dan Pemasaran	Pengemasan	1.480.000	September-Desember
	Biaya transportasi	250.000	
Jumlah		Rp 50.000.000,-	

Sumber : Data diolah

Berdasarkan uraian data di atas, diperoleh bahwa pemanfaatan anggaran yang dilakukan oleh pihak KWT selaku pelaksana telah sesuai dengan rencana pengelolaan anggaran dari pihak Dinas. Segala aktivitas pembelanjaan yang dilakukan selaras dengan apa yang diinstruksikan pihak Dinas dalam pedoman pelaksanaan. Kewajiban penghabisan anggaran juga telah dilakukan dengan bukti pengeluaran dan penggunaan anggaran yang sama-sama sebesar 50 juta rupiah.

3. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya fasilitas/peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi kebijakan yang berupa tanah serta peralatan lainnya yang berhubungan dengan kebijakan dan memberikan pelayanan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Bentuk sumber daya fasilitas/peralatan yang diberikan kepada kelompok sasaran meliputi pengadaan lahan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas dan peralatan dalam pelaksanaan program *urban farming* ini telah memadai dan berpengaruh untuk operasionalisasi pelaksanaan program. Bentuk-bentuk fasilitas yang dibutuhkan di antaranya pengadaan lahan, alat-alat bertani, tempat melakukan penanaman, serta beberapa kebutuhan perawatan tanaman.

c. Faktor Disposisi

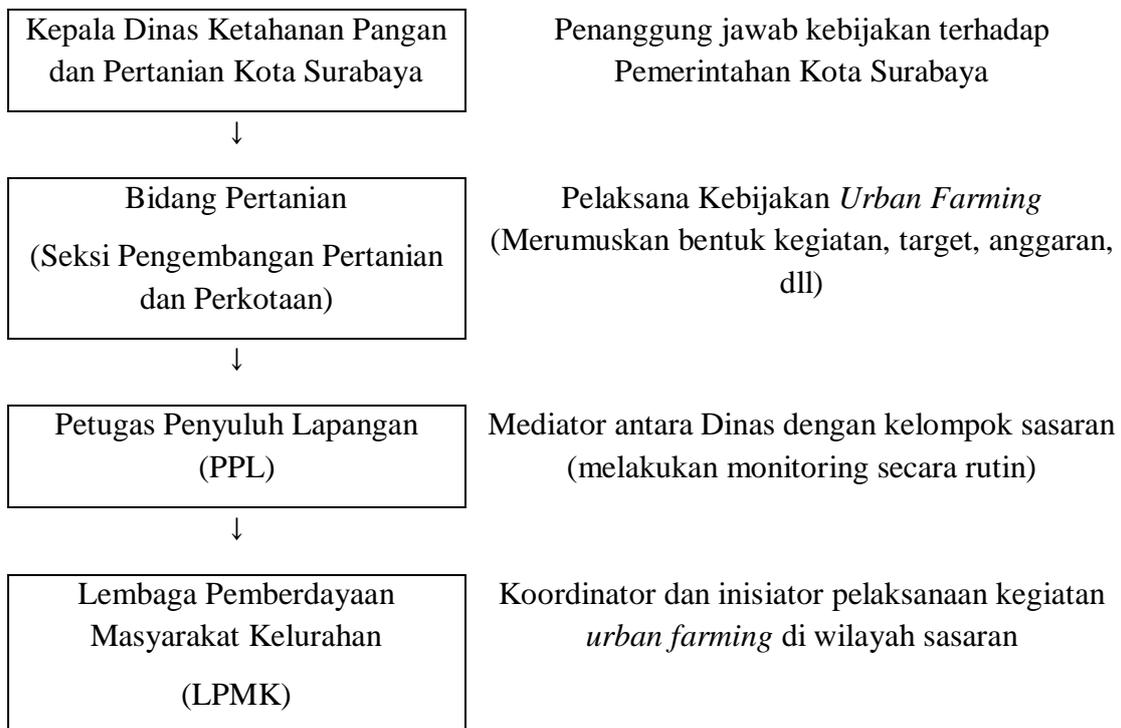
Joko Widodo (2008:105) mengungkapkan bahwa setiap kebijakan pada prinsipnya akan membutuhkan para pelaksana berkemauan dan berkomitmen tinggi. Sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa aparat pelaksana program *urban farming* telah mempercayai dan memahami antar satu dengan lainnya, di mana program *urban farming* berusaha melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat wilayah kota melalui pemanfaatan lahan kosong/lahan tidur di Kota Surabaya adalah bentuk program yang baik dan perlu ditanggapi secara positif dari masyarakat dan kelompok sasaran. Berbagai manfaat dipercaya dapat dirasakan masyarakat, salah satunya mengurangi biaya belanja rumah tangga dengan menikmati hasil dari panen serta dapat meningkatkan estetika dan kualitas lingkungan di wilayah Kota Surabaya, khususnya Kelurahan Lakarsantri.

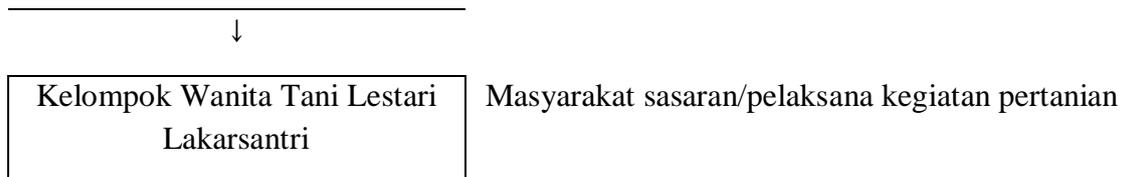
d. Faktor Struktur Birokrasi

Berkaitan dengan pelaksanaan program *urban farming*, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya ditunjuk sebagai penanggungjawab utama dari implementasi kebijakan. Dalam hal ini Kepala Dinas selaku pembina program yang berasal dari struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian itu sendiri bertugas sebagai pusat informasi terkait *urban farming* dan yang melaporkan tugas dan wewenangnya langsung kepada Walikota Surabaya. Sedangkan yang menjadi aktor pelaksana program *urban farming* berasal dari Seksi Pengembangan Pertanian Perkotaan dan Petugas Penyuluh Lapangan yang ditunjuk secara langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota Surabaya. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang terdapat dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pelaksanaan program *urban farming* sudah jelas terkait mekanisme dan sistem yang ada di dalamnya. Pembagian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pelaku program juga jelas dan terorganisir. Koordinasi yang dijalin antara aktor utama program dengan pihak lain yang terkait disini tergolong cukup baik dan tidak adanya fragmentasi yang mengganggu. Secara ringkas beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program *urban farming* di Kelurahan Lakarsantri Surabaya tercantum dalam bagan di bawah ini.

Gambar 1.2

Skema Pelaksana Program *Urban Farming* Lakarsantri



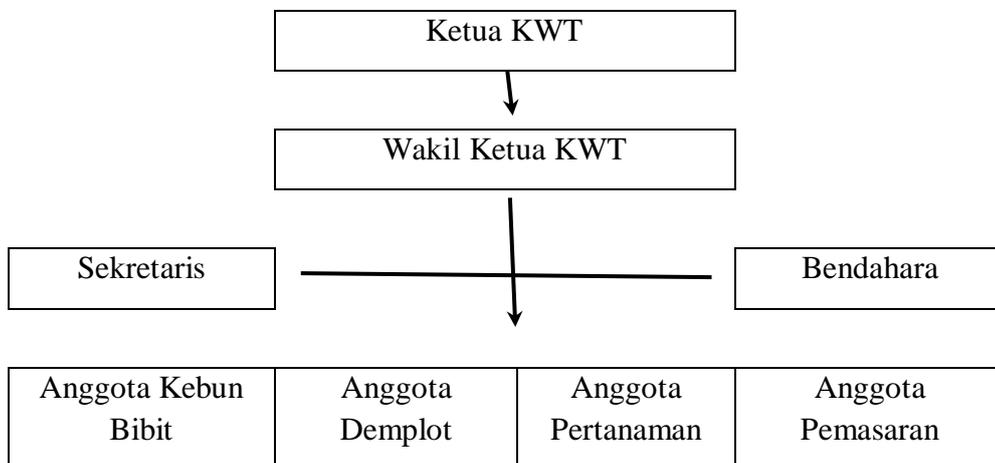


Sumber: data diolah

Secara detail penggambaran struktur yang dimaksud tercantum dalam bagan di bawah ini.

Gambar 1.3

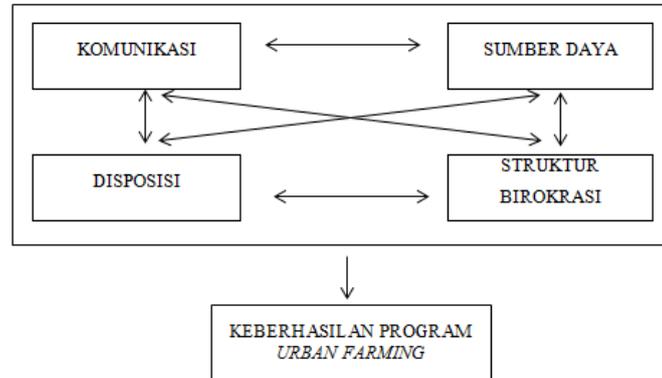
Bagan Pembagian Tugas KWTL Lakarsantri



Sumber: data diolah

Berdasarkan pemaparan keempat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi *urban farming* di Kelurahan Lakarsantri di atas, dapat digambarkan skema hubungan antar variabel sebagai berikut.

Gambar 1.4
Skema Hubungan antar Faktor



Sumber: data diolah

Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan di atas, keberhasilan program *urban farming* di Kelurahan Lakarsantri dapat dirinci dalam empat faktor sebagai berikut. Faktor komunikasi yang dimaksud berkaitan dengan distribusi informasi yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program *urban farming* di Kelurahan Lakarsantri Surabaya. Terdapat tiga indikator yang dikaji, di antaranya transformasi, kejelasan, dan konsistensi. Transformasi informasi yang dilakukan cenderung cukup baik, Hal itu dibuktikan dari hasil wawancara dari pihak dinas (Bidang Pertanian dan PPL) dan pihak masyarakat (LPMK dan Kelompok Tani) sama-sama mengatakan bahwa berjalannya informasi sudah cukup baik dan realita sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Sumber daya yang dibutuhkan terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas.

SDM yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program *urban farming* tentunya tak lepas dari pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Indikator dalam mengukur disposisi pelaksana kebijakan di antaranya pemahaman, pendalaman dan pengetahuan terkait program yang dijalankan. Keberhasilan program *urban farming* yang dilaksanakan di Kelurahan Lakarsantri Kota Surabaya tentu tak lepas dari sikap/disposisi pelaksana yang tergambar selama menjalankan program. Faktor-faktor yang disebutkan di atas saling berkesinambungan dalam mempengaruhi keberhasilan program *urban farming*. Faktor komunikasi menjadi dasar keberhasilan program, di mana yang menghubungkan berbagai pihak. Faktor Sumber daya menyokong segala hal yang dibutuhkan sehingga bentuk kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang dirumuskan. Faktor disposisi menunjang keberhasilan koordinasi antar pelaksana agar tetap berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target yang diinginkan. Faktor struktur birokrasi berperan dalam mengklasifikasikan berbagai macam tugas dan kewajiban agar saling berkontribusi di berbagai bidang/aspek yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil yang ditemukan selama menjalankan penelitian, maka diakhir penelitian ini adalah saran untuk perbaikan program *urban farming* di kota Surabaya yaitu:

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Surabaya. Meski tergolong berhasil dalam pengimplementasiannya, namun akan lebih baik jika faktor komunikasi dan sumber daya manusia lebih ditingkatkan lagi. Sebaiknya yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota Surabaya adalah melakukan sosialisasi dalam hal administrasi tahap evaluasi dan pelaporan. Dalam Faktor sumber daya manusia program *urban farming* di kota Surabaya khususnya pada Petugas Penyuluh Lapangan secara kuantitas masih kurang, Sebaiknya yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah menambah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) sehingga secara kualitas dan kuantitas akan terus meningkat hingga dapat mempercepat perkembangan program *urban farming* di seluruh wilayah kota Surabaya.
2. Pelaku Kebijakan *Urban farming* di Kelurahan Lainnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam penelitian ini dijelaskan analisis keberhasilan kebijakan *urban farming* di Kelurahan Lakarsantri. Hasil ini dapat dijadikan sebagai referensi dan pedoman bagi pelaku kebijakan serupa di kelurahan lainnya agar dapat memperoleh hasil yang merujuk pada keberhasilan seperti yang dicapai di kelurahan Lakarsantri. Dengan demikian, keberhasilan akan berpeluang tercapai di semua wilayah sehingga menghasilkan tingkat ketahanan pangan yang tinggi khususnya di wilayah Kota Surabaya.

Referensi

- BKP PERTANIAN, 2019, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia”, dilihat 22 Juli 2020. <http://bkp.pertanian.go.id/>.
- Cheng, L., Brown, G., 2020. “An evaluation of contemporary China’s land use policy – The Link Policy: A case study from Ezhou, Hubei Province”. *Land Use Policy*, Vol 91, 104 – 423.
- Dwiyanto, I 2009 *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*, Gava Media, Yogyakarta.
- Edi Suharto. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Sosial dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung.
- Efriyani, S 2010, ‘Jiwa Entrepreneurship untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan’, *Journal Of Economic and Policy (JEJAK)*, Vol. 3, no. 1, hh. 232-237.
- Joko, W 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia, Malang.
- Leo, A 2012, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.

- Long, Y, Han, H 2020, "Evaluation of urban planning implementation from spatial dimension: An analytical framework for Chinese cities and case study of Beijing", *Habitat International*, vol. 101, hh. 102 - 197.
- Mathew, J dan Michael, H 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Miftah, T 1993, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mulyadi, D 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Moleong, L 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Parsudi, S 1993, *Kemiskinan di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Patjar, S 2007, "Analisis Kritis Terhadap Paradigma dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 25, no. 1 , hh, 1 – 18.
- Raco, J 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Said, Z 2012, *Kebijakan Publik*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.
- Smith, Jac, H 2001, *Urban Agriculture: Food, Jobs, and Sustainable Cities*. Habitat II Series.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Winarno, B 2005, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Presindo, Yogyakarta:
- Zeza, A. dan Tasciotti, L 2010, "Urban agriculture, poverty, and food security: Empirical evidence from a sample of developing countries". *Food policy*, vol. 35, no. 4, hh. 265-273.